

Graphical abstract



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA SUMARRANG KECAMATAN CAMPALAGIAN

¹Wardania, ²Chuduriah Sahabuddin, ³Mukhlis Hannan
^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
wardaniatkj079@gmail.com

Abstract

Poverty is still a problem that is quite prominent in the regional development process. This research aims to determine the policy analysis of the regional government of Polewali Mandar Regency in overcoming poverty in Sumarrang Village, Campalagian District. This research is a qualitative descriptive study that explains the facts and results of data analysis obtained in the field. The research used purposive sampling with instruments in the form of interview guidelines and documentation. The data collected is primary data and secondary data, by means of observation, interviews and documentation. Next, the data was analyzed using a qualitative approach through data reduction, data display, and drawing conclusions. The research results show that local government efforts have shown some significant progress in reducing poverty levels. The various policies and programs implemented have had a positive impact, although there are still several challenges that need to be overcome. In general, extreme poverty in Sumarrang village is considered less, but the data highlights that sick people are the group most affected. There are several social assistance programs run by the government, such as BLT (Direct Cash Assistance), BPNT (Non-Cash Food Assistance), and PKH (Family Hope Program). To reduce poverty, it is more important to focus on opening employment opportunities rather than simply providing direct assistance such as basic necessities or BLT (Direct Cash Assistance).

Keywords: Policy Analysis, Overcoming, Poverty

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi problem yang cukup mengemuka dalam proses pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fakta-fakta dan hasil analisis data yang diperoleh di lapangan. Penelitian menggunakan purposive sampling dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder, dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah telah menunjukkan beberapa kemajuan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan dan program yang diterapkan telah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Secara umum kemiskinan ekstrim di desa Sumarrang dianggap kurang, namun data menyoroti bahwa orang-orang sakit merupakan kelompok yang paling terdampak. terdapat beberapa program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan PKH (Program Keluarga Harapan). untuk mengurangi kemiskinan, lebih penting untuk fokus pada pembukaan lapangan kerja daripada sekadar memberikan bantuan langsung seperti sembako atau BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Penanggulangan, Kemiskinan

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.5629

Received : 30-04-2026/ Received in revised form : 08-05-2026/ Accepted : 15-05-2026

1. PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun desa, namun tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan yang serius. Tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di desa sudah menjadi salah satu masalah yang serius, sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan belum bisa memberikan dampak besar. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), pemerintah desa perlu meluncurkan program yang dapat mengubah bantuan bersyarat menjadi jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Hal ini akan difokuskan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan mengambil studi kasus di Kabupaten Polewali Mandar, di Desa Sumarrang.

Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dilakukan melalui sebuah Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun pembangunan ekonomi telah berlangsung, namun masih banyak daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi termasuk di Desa Sumarrang Kec. Campalagian.

Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas dasar. Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari program bantuan sosial.

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (Khothimah & Hertati, 2021).

Kebijakan atau kajian kebijakan merujuk pada proses pengambilan keputusan penting dalam organisasi, yang melibatkan identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau alokasi anggaran, serta pemilihan opsi berdasarkan dampaknya. (Nugroho & Reswari, 2024). Kebijakan juga dapat dipahami sebagai mekanisme politik, finansial, manajerial, atau administratif yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. (Murdiyana & Mulyana, 2017). Kebijakan adalah pernyataan atau dokumen yang memberikan panduan umum tentang batasan dan arah bagi seseorang untuk bertindak. Secara etimologis, "kebijakan" merupakan terjemahan dari kata "*policy*". Kebijakan juga dapat diartikan sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan. Kebijakan biasanya berupa keputusan yang dibuat secara hati-hati dan mendalam

oleh pengambil keputusan tingkat tertinggi, bukan merupakan kegiatan itu sendiri (Fajri, 2022).

Anderson (2021) mendefinisikan kebijakan berarti serangkaian tindakan yang bertujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sebuah kebijakan sangat berkaitan dengan pengaturan agenda (Hannan, 2019) yang mengkaji berbagai persoalan dan terbentuk dalam pengaturan institusional yang berkaitan dengan proses organisasi, serta saling berinteraksi dalam menanggapi isu politik maupun non-politik (Safitri, 2021). Analisis kebijakan adalah aktivitas praktis dan intelektual yang bertujuan untuk secara teliti, kritis, dan komunikatif menghasilkan pengetahuan tentang proses kebijakan yang dilaksanakan. Analisis kebijakan dapat diartikan sebagai ilmu yang memanfaatkan berbagai bentuk pengkajian dalam argumentasi dan diskusi politik untuk menghasilkan, menilai secara kritis, dan menyampaikan pengetahuan terkait kebijakan tersebut (Hardiana, 2018). Analisis kebijakan dapat menganalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu.

Menurut (Meutia, 2017) tahapan kebijakan publik dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang akan dikukuhkan untuk di selesaikan oleh kebijakan.
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*) mengidentifikasi masalah, akumulasi, atau bukti baru yang dapat menghasilkan masalah lain yang akan dihadapi oleh kebijakan.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah tahap penyusunan dan pengajuan rumusan kebijakan melalui berbagai pihak, termasuk organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) melibatkan proses pengesahan melalui tindakan politik yang dilakukan oleh kelompok penekan, partai politik, presiden, dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan oleh birokrasi, dengan dukungan anggaran publik, serta aktivitas agen eksekutif yang terorganisir.
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah, konsultan eksternal, media, dan masyarakat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Munawaroh, 2019). Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, pemerintah daerah berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya (Ishmatuddin, 2021).

Menurut Ferezagia (2018) kemiskinan adalah persoalan mendasar karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan paling dasar dalam kehidupan. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah global karena banyak negara menghadapi tantangan yang sama.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan (Rahayu, 2018) yaitu:

a. Faktor Individual,

Faktor ini berkaitan dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan individu dalam menghadapi kehidupan mereka sendiri.

b. Faktor Sosial,

Faktor ini mencakup kondisi lingkungan sosial yang dapat menjebak seseorang dalam kemiskinan, seperti diskriminasi berdasarkan usia, gender, atau etnis. Faktor ini juga meliputi kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang seringkali menyebabkan kemiskinan berlangsung antar generasi.

c. Faktor Kultural,

Faktor ini merujuk pada kondisi atau kualitas budaya yang berkontribusi pada kemiskinan. Faktor ini sering dikaitkan dengan konsep budaya kemiskinan, yang menghubungkan kebiasaan hidup dengan kemiskinan (Simatupang, 2017). Penelitian Oscar Lewis pada tahun 1984 di Amerika Latin menunjukkan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan yang berbeda dari masyarakat umum (Hamdani & Wulandari, 2016). Sikap seperti malas, fatalisme, ketidakmampuan berwirausaha, dan kurangnya etos kerja sering ditemukan di kalangan orang miskin.

d. Faktor Struktural,

Faktor ini berhubungan dengan sistem atau struktur yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak mudah diakses, yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi miskin. Contohnya, penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia telah menyebabkan petani, nelayan, dan pekerja sektor informal tertekan oleh pajak dan iklim investasi yang lebih menguntungkan bagi orang kaya dan investor asing, memperburuk kesenjangan kekayaan.

Penanganan kemiskinan merupakan upaya yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya ini meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Karenanya, sangat diharapkan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan yang luas (Nurandani, 2021). Kriteria atau kategori fakir miskin adalah pedoman atau standar yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai fakir miskin dan berhak menerima bantuan atau program kesejahteraan. Kriteria ini dapat berbeda-beda antar negara, bahkan dalam satu negara pun bisa berbeda sesuai dengan peraturan yang ada.

Kriteria atau kategori fakir miskin menurut keputusan menteri sosial, mencakup beberapa kriteria umum yang sering digunakan untuk menilai status fakir miskin melibatkan aspek-aspek (Hikmawati, 2016) seperti:

- a) Pendapatan: Penilaian pendapatan adalah kriteria umum. Keluarga atau individu dengan pendapatan di bawah ambang batas tertentu dapat dianggap sebagai fakir miskin. Batas pendapatan ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebijakan setiap negara.
- b) Aset: Selain pendapatan, aset atau kekayaan juga bisa menjadi pertimbangan. Keluarga atau individu dengan aset yang terbatas atau hampir tidak memiliki aset bisa masuk ke dalam kategori fakir miskin.
- c) Kondisi Sosial dan Kesehatan: Beberapa kriteria melibatkan kondisi sosial dan kesehatan. Keluarga yang tinggal dalam kondisi perumahan yang tidak layak, memiliki akses kesehatan yang terbatas, atau menghadapi masalah-masalah sosial tertentu dapat dianggap memenuhi kriteria fakir miskin.
- d) Jumlah Tanggungan: Jumlah anggota tanggungan dalam keluarga juga dapat menjadi kriteria. Keluarga dengan banyak tanggungan, terutama jika pendapatan keluarga rendah, cenderung lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
- e) Wilayah Geografis: Kriteria ini bisa melibatkan wilayah geografis atau lokasi tempat tinggal. Beberapa program kesejahteraan mungkin lebih ditujukan untuk wilayah-wilayah tertentu yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
- f) Pendidikan dan Keterampilan: Pendidikan dan keterampilan juga dapat menjadi faktor penilaian. Orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah atau keterampilan yang terbatas mungkin lebih cenderung masuk ke dalam kategori fakir miskin.

Perlu dicatat bahwa kriteria-kriteria ini dapat bervariasi dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Informasi yang paling akurat dan terkini dapat ditemukan dalam peraturan resmi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada saat ini dengan mengandalkan data yang tersedia, serta menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut. (Tabo et al., 2022).

Penelitian yang sifatnya dapat mendeskripsikan dan kebanyakan menggunakan analisis data, proses makna yang jadi tampilan serta landasan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian dapat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan (Padang et al., 2023).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengentasan kemiskinan khususnya di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif dengan cara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi masalah

Di Desa Sumarrang, persepsi tentang kemiskinan tidak hanya terbatas pada kondisi ekstrim seperti kekurangan pangan atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sebaliknya, ketika ada pembagian atau distribusi apa pun (sepertinya bantuan atau program tertentu), banyak penduduk langsung merasa miskin. Ini mengindikasikan bahwa ada kesadaran akan ketimpangan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya atau bantuan di desa tersebut.

Desa Sumarrang memiliki populasi sekitar 6.000 jiwa dengan 1.721 kepala keluarga. Informasi ini memberikan gambaran tentang ukuran dan struktur demografis desa, yang penting untuk memahami skala dan dampak kemiskinan di level komunitas. Meskipun secara umum kemiskinan ekstrim di desa tersebut dianggap kurang, wawancara menyoroti bahwa orang-orang sakit merupakan kelompok yang paling terdampak. Mereka memiliki lahan atau lokasi yang tersedia, tetapi karena kesehatan yang buruk, mereka tidak dapat bekerja untuk mengatasi kemiskinan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam tingkat dan karakteristik kemiskinan di desa, dengan orang sakit menjadi kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Kemudian dalam konteks kemiskinan, kesehatan merupakan salah satu aspek yang paling diutamakan. Fokus pada orang sakit sebagai kelompok yang paling membutuhkan perhatian menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Sumarrang mungkin perlu menitikberatkan pada akses dan ketersediaan layanan kesehatan.

Secara keseluruhan penjelasan diatas memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang dinamika kemiskinan di Desa Sumarrang, termasuk persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi mereka, identifikasi kelompok rentan seperti orang sakit, dan prioritas dalam penanganan masalah kesehatan. Informasi ini dapat menjadi dasar yang baik untuk analisis lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang sesuai untuk mengurangi

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di desa tersebut.

b. Penyusunan agenda

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan bahwa di Desa Sumarrang, terdapat beberapa program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, persepsi masyarakat terhadap efektivitas program bantuan ini bervariasi. Beberapa informan merasa bahwa BLT dan BPNT tidak berfungsi dengan baik, sementara PKH dianggap sebagai program yang paling berhasil.

Terdapat masalah ketidaksinkronan dalam data kemiskinan antara tingkat desa dan tingkat kabupaten. Data kemiskinan di desa berdasarkan patokan dari tahun 2011 dan mungkin tidak diperbarui secara berkala atau tidak sinkron dengan data kemiskinan di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten untuk memastikan data yang akurat dan up-to-date.

Ada tanggapan tentang politisasi dalam penyaluran bantuan sosial, terutama terkait dengan posisi Kepala Desa yang dianggap sebagai jabatan politik. Hal ini mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa keputusan terkait bantuan sosial dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau hubungan pribadi, bukan berdasarkan kriteria yang objektif dan kebutuhan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil yang menunjukkan perlunya transparansi dan keadilan dalam penilaian dan penyaluran bantuan sosial. Masyarakat diharapkan dapat bijaksana dalam menilai kebijakan pemerintah desa dan bersikap jujur dalam menilai kebutuhan mereka sendiri. Penggunaan data yang tepat dan partisipasi masyarakat serta lembaga seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan kepala dusun dianggap krusial untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukannya.

Ada tantangan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa, termasuk pemaksaan untuk memberikan bantuan kepada individu yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kriteria atau tidak layak menerima bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tekanan politik atau sosial di tingkat lokal yang dapat mempengaruhi keputusan terkait penyaluran bantuan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menggambarkan kompleksitas dalam implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa, termasuk tantangan dalam pendataan yang akurat, politisasi dalam pengambilan keputusan, dan perlunya keterbukaan serta keadilan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini dapat menjadi landasan penting untuk evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan agenda kebijakan di masa depan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan

kemanfaatan program-program sosial di Desa Sumarrang.

c. Perumusan kebijakan

Informan menyoroti bahwa untuk mengurangi kemiskinan, lebih penting untuk fokus pada pembukaan lapangan kerja daripada sekadar memberikan bantuan langsung seperti sembako atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pembukaan lapangan kerja dianggap sebagai solusi yang lebih berkelanjutan untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kondisi kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa bantuan langsung seperti BLT dianggap tidak cukup efektif dalam mengubah nasib masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera. Hal ini menggambarkan keraguan terhadap kebijakan yang hanya menawarkan solusi jangka pendek tanpa memberikan perubahan struktural yang lebih dalam. Informan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap ketidakpastian dalam kebijakan yang diterapkan serta kritik terhadap kebijakan yang dianggap masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang konsisten, jelas, dan berkesinambungan dalam mengatasi kemiskinan.

Informan menyarankan agar dana desa diberikan kewenangan penuh untuk digunakan dalam program-program yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan ketahanan pangan. Ini mencerminkan dorongan untuk pengelolaan dana desa yang lebih strategis dan efektif. Ada penekanan pada pentingnya mendukung pedagang kecil dan pelaku usaha lokal dengan memberikan bantuan yang lebih terarah, misalnya modal usaha atau pelatihan. Ini dianggap lebih efisien daripada sekadar memberikan bantuan konsumsi yang hanya mengganjal perut sementara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan di Desa Sumarrang. Fokus pada pembukaan lapangan kerja, kritik terhadap efektivitas bantuan langsung, dan perlunya manajemen dana desa yang lebih baik adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa tersebut. Evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan dan respons terhadap masukan dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat berhasil mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara efektif.

d. Pengesahan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, dengan informan terkait tahapan perumusan kebijakan di Desa Sumarrang, terdapat beberapa poin penting yang bisa diulas lebih lanjut:

Informan menyoroti bahwa pengurangan persentase kemiskinan dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan dalam upaya mengurangi

kemiskinan di tingkat desa. Fokus pada penurunan skala tingkat kemiskinan menunjukkan komitmen untuk mencapai perbaikan nyata dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Informan menekankan pentingnya dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya dengan penyediaan tanaman jagung dan bibit-bibit pupuk kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dipandang melalui pemenuhan kebutuhan dasar dalam pertanian. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan.

Informan juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan. Melalui forum musyawarah desa atau musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan), masyarakat dapat mengusulkan kebutuhan dan prioritas yang spesifik untuk desa mereka sendiri. Hal ini penting karena kebutuhan setiap desa bisa berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan lokal.

Pemerintah kabupaten diharapkan untuk tidak menyamaratakan kebutuhan setiap desa, melainkan menyesuaikan kebijakan dan program dengan karakteristik dan kebutuhan yang unik dari masing-masing desa. Misalnya, jenis tanaman yang cocok untuk ditanam atau jenis pupuk yang dibutuhkan bisa berbeda antar daerah, sehingga perlu pendekatan yang lebih spesifik dan lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan dalam mengurangi kemiskinan, dukungan terhadap sektor pertanian sebagai strategi utama, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal. Implementasi kebijakan yang mempertimbangkan faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sumarrang.

e. Implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan terkait tahapan implementasi kebijakan di Desa Sumarrang, terdapat beberapa poin penting yang bisa diulas lebih lanjut:

Informan menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi bantuan adalah kurangnya tanggung jawab dari penerima bantuan. Ada keluhan bahwa sebagian besar bantuan, seperti ternak, tidak diurus dengan baik oleh penerima bantuan. Contohnya, ternak sering kali dijual segera setelah diterima, tanpa menunggu hingga ternak tersebut berproduksi. Hal ini menunjukkan kurangnya keterlibatan aktif dan komitmen dari penerima bantuan dalam mengelola aset yang diberikan.

Informan mengkritik bahwa meskipun pemerintah telah memberikan banyak bantuan, seperti 50 ekor kambing pada suatu waktu, bantuan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan karena banyak yang hilang atau tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat

penerima. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih bijak dalam penyaluran bantuan, serta pentingnya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif terhadap penerima bantuan.

Penting terlihat bahwa pengelolaan bantuan memerlukan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Tidak hanya memberikan bantuan secara fisik, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa penerima bantuan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola bantuan tersebut dengan baik.

Perlu dilakukan edukasi dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat penerima bantuan tentang pentingnya mengelola bantuan dengan bijak dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, atau penyuluhan mengenai manfaat jangka panjang dari bantuan yang diterima, serta cara untuk memaksimalkan potensi bantuan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme implementasi kebijakan bantuan sosial di Desa Sumarrang. Tantangan seperti kurangnya tanggung jawab dan kurangnya pengelolaan yang baik perlu diatasi dengan strategi yang lebih efektif, termasuk pengawasan yang ketat, edukasi kepada penerima bantuan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya mengelola bantuan dengan benar untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

f. Evaluasi Kebijakan

Hasil penelitian dengan informan terkait tahapan keenam dalam implementasi kebijakan menyoroti beberapa aspek krusial terkait evaluasi dan pengukuran indikator untuk bantuan sosial, khususnya terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Berikut adalah ulasan luas terhadap hasil wawancara tersebut:

Informan menyampaikan bahwa penting untuk melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan seperti PKH. Ada perhatian bahwa beberapa penerima bantuan mungkin dianggap sudah mampu secara ekonomi namun masih terus menerima bantuan, sementara di sisi lain, ada masyarakat lain yang lebih membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan dari dinas sosial. Hal ini menunjukkan perlunya penilaian yang lebih akurat dan adil dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan yang sesungguhnya.

Informan juga menggarisbawahi kompleksitas dalam menentukan status kemiskinan. Penetapan indikator kemiskinan yang akurat memerlukan kerja sama antara lembaga kerjasama kabupaten dan pemerintah desa. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menilai secara objektif dan konsisten mana yang termasuk dalam kategori miskin dan mana yang tidak, sehingga kebijakan dan bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

Salah satu tantangan yang diungkapkan adalah proses administratif yang lambat dan keputusan yang tidak selalu konsisten dalam menyetujui permohonan bantuan. Ini dapat mengakibatkan penundaan atau ketidakpastian dalam penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses pengelolaan dan pengawasan agar bantuan dapat diberikan secara tepat waktu dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, penting untuk memperbaiki sistem evaluasi yang lebih adil dan transparan dalam menentukan penerima bantuan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan keberlanjutan dari bantuan sosial yang disediakan.

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya evaluasi yang teliti, pengukuran indikator yang akurat, dan peningkatan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan efisien kepada mereka yang membutuhkan. Evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan sistem merupakan langkah kunci dalam memastikan keberhasilan jangka panjang dari program-program bantuan sosial di Desa Sumarrang.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan terhadap Kabupaten Polewali Mandar, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah telah menunjukkan beberapa kemajuan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan dan program yang diterapkan telah memberikan dampak positif, meskipun masih ditemukan sedikit tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah berhasil mengimplementasikan program-program seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan PKH (Program Keluarga Harapan), yang telah cukup membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi program, alokasi sumber daya yang lebih tepat, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait.

Menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ini mencakup sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, atau faktor-faktor eksternal lainnya. Menganalisis dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat setempat, baik secara ekonomi maupun sosial. Merangkum temuan utama dari analisis kebijakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi. Kesimpulan

harus dapat menggambarkan kontribusi penelitian terhadap pemahaman tentang efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2021). *Public policymaking: An introduction*. Cengage Learning.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Hamdani, H., & Wulandari, K. (2016). Faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional (The factor of poverty causes traditional fisherman). *E-Sospol*, 3(1), 62–67.
- Hannan, M. (2019). Implementasi kebijakan program beras miskin (Raskin) di Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1).
- Hardiana, D. (2018, September 14). *Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar*. Stiacimahi.ac.id.
- Ishmatuddin, M. Q. K. (2021). *Pemerintah daerah: Konsep dan implementasi*. Penerbit Citra Lestari.
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi kebijakan program bantuan sosial tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99–110.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Munawaroh, N. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(2), 143–156.
- Murdiyana, M., & Mulyana. (2017). *Analisis kebijakan: Teori dan praktik*. Penerbit Graha Ilmu.
- Nugroho, M. F. A., & Reswari, N. Z. Y. (2024). Kampanye budaya hari batik guna meningkatkan kecintaan Gen-Z pada batik. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(1), 343–350.
- Nurandani, M. A. (2021). *Evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung* [Skripsi/Tesis, Universitas Lampung].
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 7(1), 35–45.
- Safitri. (2021). *Analisis kebijakan publik: Pengantar studi kebijakan publik*. Pustaka Jaya.
- Simatupang, T. H. (2017). *Kemiskinan kultural: Konsep dan realitas*. Penerbit Buku Kita.
- Tabo, S., Nursafitra, M., & Biongan, A. (2022). Peranan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 2(2), 1–14.